



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jambukarang No. 8 Telp. (0281) 891450 Facs., (0281) 895194

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 050/2093 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPELITBANGDA,

- Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Kerja SKPD Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Kerja SKPD Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Dengan Surat Keputusan ini ditetapkan Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- (2) Uraian mengenai Renja Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Renja Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Bappeda merupakan implementasi Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana kerja yang selanjutnya disebut Renja SKPD yang penyusunannya mengacu dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat serta untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berangkat dari ketentuan-ketentuan yang ada, Bappelitbanda Kabupaten Purbaingga sebagai salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dituntut untuk mempunyai rencana kerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2020 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review Rancangan awal RKPD
- E. Usulan Program / Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra BAPPEDA

Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

2.1.1. Kinerja Sasaran

Hingga akhir tahun 2018, BAPPEDA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah

Dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai AKIP komponen perencanaan sebesar 19,5 dari nilai maksimal 30 atau setara dengan 65. Penilaian ini naik dari penilaian tahun 2017 yakni sebesar 18,88 atau setara dengan 62,93.

Selengkapanya dibawah ini perbandingan penilaian AKIP perkomponen tahun 2016 s.d 2018 sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3,1
Perbandingan komponen AKIP
Tahun 2016 s.d 2018
Kabupaten Purbalingga

Komponen yang dinilai	Bobot	2016	2017	2018
Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,5
Pengukuran Kinerja	25	9,55	12,24	12,39
Pelaporan Kinerja	15	8,96	10,05	10,32
Evaluasi Internal	10	5,82	5,27	6,06
Capaian Kinerja	20	8,06	11,31	10,86
Nilai Hasil Evaluasi	100	50,03	57,75	58,79
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC

Dalam mencapai tujuan tersebut sasaran antara rencana strategis adalah meningkatnya kualitas perencanaan, keberhasilan sasaran ini ditandai dengan nilai rata-rata capaian kinerja program pembangunan Kabupaten Purbalingga. kualitas perencanaan yang baik menggambarkan tiga hal yakni dokumen perencanaan, kualitas pengendalian dan evaluasi serta kemampuan mengorganisir sumberdaya. Hal ini tergambar pada ketepatan dalam penetapan indikator kinerja, pemberian target dan ketercapaiannya seluruh target yang telah ditetapkan. Adapaun rumus dari indikator rata-rata capaian kinerja program adalah

Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data
-----------	----------------------------	----------------------	-------------------	-------------

Rata-rata capaian kinerja program	Pencapaian target kinerja program menggambarkan efektifitas perencanaan dan berjalannya fungsi Bappelitbangda dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan serta evaluasi dan pengendalian perencanaan	$\frac{\sum_{i=1}^n Ki}{n}$ Ki = capaian indikator kinerja program 1 sampai dengan n yang ada di RKPD n = banyaknya indikator kinerja program	Non Komulatif	Evaluasi Renja TW IV oleh Bappelitbangda
-----------------------------------	--	--	---------------	--

Rata-rata Capaian kinerja program pembangunan pada tahun 2018 adalah sebesar 95,76 persen dari target kinerja sebesar 96 persen, sehingga tingkat capaian sasaran kinerja sebesar 99,75 persen. Capaian kinerja ini merupakan perhitungan rata-rata dari capaian kinerja seluruh urusan dan fungsi penunjang urusan sebanyak 398 indikator dari 97 program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Tabel 3.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan
BAPPELITBANGDA
Tahun 2016 - 2018

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2016			2017			2018		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas perencanaan									
	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	95,5	92,46	96,82	96	102,44	106,71	97	99,87	102,4

Sumber : Buku Evaluasi RKPD Tahun 2018, Bappelitbangda Purbalingga

Capaian kinerja sasaran sebesar 99,87 menunjukkan kinerja yang baik. Secara lebih mendalam dari 400 indikator 356 indikator atau 89 persen indikator telah menunjukkan kinerja cukup, baik dan sangat baik dan terdapat 44 indikator atau 11 persen yang kinerjanya kurang.. Pada grafik 3.1 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang berwarna biru menunjukkan jumlah indikator per urusan yang capainya cukup, baik dan sangat baik sedangkan yang warna kuning menunjukkan capaian kinerjanya kurang.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat 5 (lima) program yang rata-rata capaian indikatornya dibawah 50 persen yakni :

- Program Pendidikan Non Formal

- Program fasilitasi akses pendidikan luar biasa, Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
- Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik
- Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
- Program Ketrasmigrasian

Solusi yang ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja program-program tersebut adalah dengan memberi perhatian pada Pendidikan Non Formal, pengembangan destinasi wisata; pengembangan, pengolahan dan pemasaran produk pertanian; dan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan. Sedangkan terkait ketrasmigrasian lebih banyak menunggu dari kebijakan pemerintah pusat.

a. Program Pendidikan Non Formal

Program pendidikan non formal memiliki 2 indikator kinerja yakni Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi dan Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi. Purbalingga terdapat 35 lembaga kursus dan pelatihan. Pada tahun 2018 telah dilakukan pembinaan-pembinaan namun sampai saat ini baru 4 persen yang telah terakreditasi, Adapun terkait PKBM di kabupaten purbalingga terdapat Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, dan C untuk sasaran A = 15 kelompok, B= 40 kelompok, C = 51 kelompok, dari sejumlah 106 PKBM tersebut baru 3 persen yang telah terakreditasi.

b. Program fasilitasi akses pendidikan luar biasa, Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

Pada program ini ditargetkan pengiriman terhadap anak keluarga kurang mampu tetapi mempunyai prestasi dan diterima difakultas kedokteran, seluruh biaya dan kehidupan ditanggung oleh pemerintah daerah. Namun demikian pada tahun 2018 tidak ada keluarga miskin diterima difakultas kedokteran. Usaha yang telah dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yakni UNSOED Purwokerto dan UGM Yogyakarta agar peserta dari Purbalingga diberikan kelonggaran dalam persyaratan masuk Perguruan Tinggi, akan tetapi dari kedua Perguruan Tinggi tersebut menghendaki proses sesuai jalur yang ada.

c. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pada program ini indikator yang tidak tercapai adalah Intensitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan capaian 0 persen, rendahnya capaian ini karena peran ini telah diambil oleh BNN. Adapun dalam upaya pencegahan lainnya melalui operasi kertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP dan masuk pada Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.

d. Program Ketrasmigrasian

Program transmigrasi dengan indikator Jumlah Calon Transmigran yang difasilitasi dengan capaian 20 persen, rendahnya capaian ini tergantung alokasi dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018 transmigran yang difasilitasi sebanyak 3 orang dari 15 target yang telah direncanakan.

Dari capaian kinerja program tersebut masih terdapat permasalahan yakni beberapa indikator kinerja pencapaiannya masih kurang. Sedangkan ada beberapa

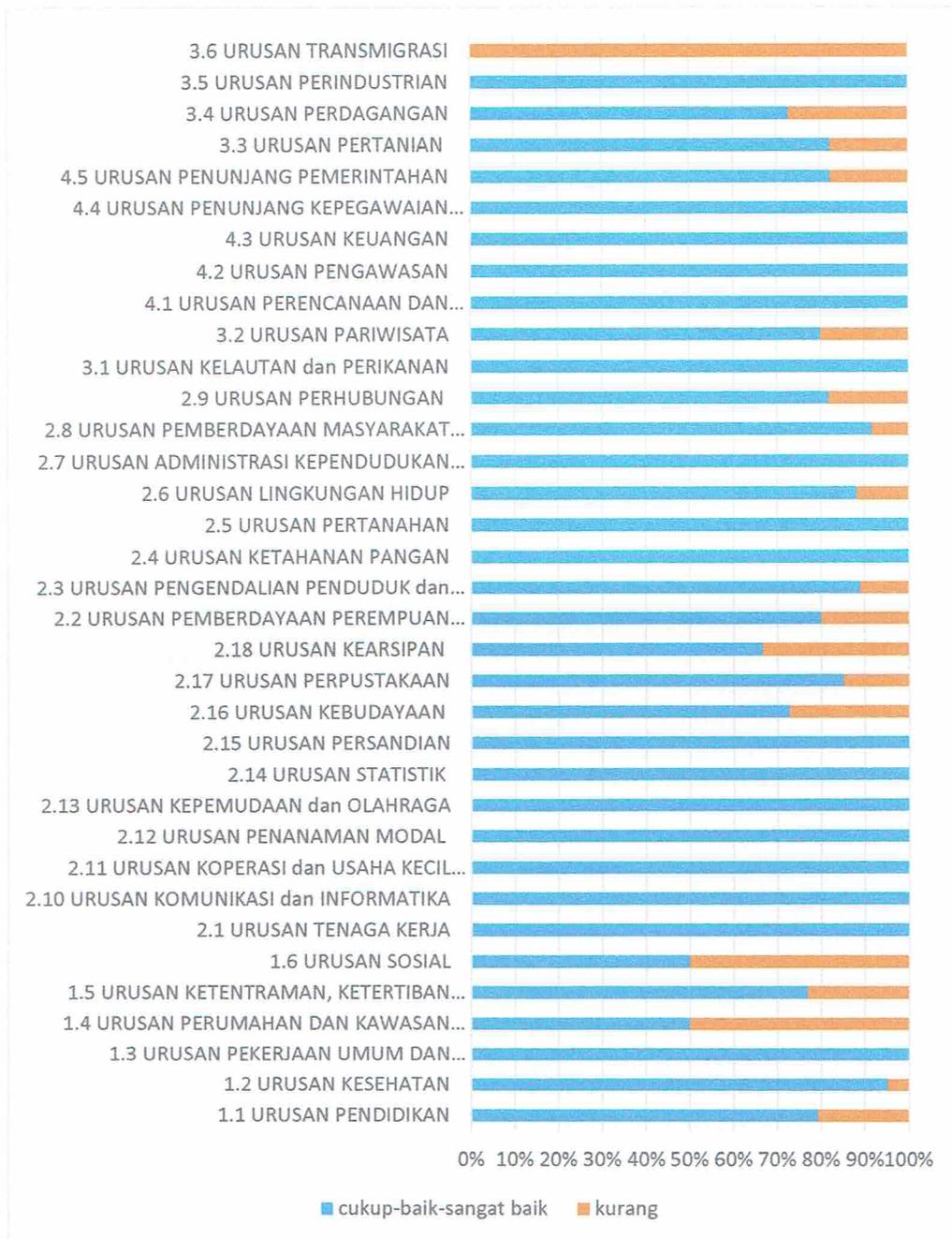
indikator kinerja yang pencapaiannya sangat luar biasa yakni diatas 1000 persen hingga mencapai 2 juta persen antara lain Prevalensi HIV/AIDS, Turn Over Interval (TOI), Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi serta jumlah Pokdarwis yang dibina.

Atas permasalahan tersebut perlu megambil langkah-langkah kedepan antara lian :

- 1) Melakukan definis ulang atas konsep difenisi setiap program agar memperjelas penghitungan kinerja ketika terjadi perpindahan/pergantian pegawai yang membidangai.
- 2) Mengawal setaiap indikator secara tribulanan melalui penyusunan rencana aksi kinerja
- 3) Menyiapkan base data yang konsisten agar setaiap indikator dapat ditentukan target dan realisasinya secara baik

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Menurut Bidang Urusan
yang Bernilai Kurang dengan sangat baik-baik dan cukup
Kabupaten Purbalingga



Sumber : Buku Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2018, Bappelitbangda Purbalingga

1. Tujuan 2 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah

Dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menempatkan 1 (satu) inovatornya yang masuk nominasi tingkat nasional yakni Teknologi Budidaya Ikan Gurame terpal. Dalam mewujudkan Kapasitas Lembaga Kelitbangan daerah, sasaran yang telah dicapai pada tahun 2017 adalah meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan iptek daerah. Peningkatan kualitas litbang ditandai dengan Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Pada tahun 2017 terdapat 1 rekomendasi kebijakan yang diterapkan kedalam kebijakan daerah yakni penerapan penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis desa yakni

dengan keluarnya surat keputusan bupati tentang penugasan pejabat eselon 2 untuk mengawal 1 desa merah.

Tabel 3.3
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan LITBANG
BAPPELITBANGDA
Tahun 2017 dan 2018

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2017			2018		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya kualitas kelitbangan						
	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50 persen	50 persen (1 dari 2 rekomendasi)	100	50	50 (1 dari 2 rekomendasi)	100

2.1.1. Kinerja Program Dan Kegiatan

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Program penguatan kelembagaan perangkat daerah terdiri dari 3 indikator yakni Persentase Temuan Lembaga Pengawasan yg ditindaklanjuti, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Rata-rata Capaian SKP. Rata-rata capaian program tersebut adalah 98,58 persen dari 3 indikator. Secara lengkap capain indikator kinerja program penguatan kelembagaan perangkat daerah adalah

No	Indikator Program	Target 2018	realisasi	Capaian
1	Persentase Temuan Lembaga Pengawasn yg ditindaklanjuti Indeks	100	100	100 %
2	Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	83,57	98,32 %
3	Rata-rata Capaian SKP	87	84,76	97,42 %
	Total			98.58 %

Program Penguatan kelembagan perangkat daerah pada tahun 2018 terdapat 7 kegiatan yakni

i. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)
----------------	-----------------	-------------

423.465.000	394.267.771	93,11			
Hasil :					
penyediaan daya listrik terjadi efisiensi sebesar 10,67 persen dari target ketersediaan listrik namun karena biaya per KWH naik menyebabkan kekurangan anggaran untuk pembayaran listrik. Sedangkan untuk air minum terjadi inefisiensi sebesar 6,58 persen. Dan secara umum kinerja dari kegiatan ini telah tercapai.					
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya daya listrik	Kwh	1.824	1.648	110,67
2	Tesedianya Air PAM	M3	1.000	1.016	98,42
3	Tersedianya jasa telpon	sambungan	3	3	100
4	Tersedianya bahan kantor	bulan	12	12	100

c. Permasalahan yang dihadapi :

Kenaikan tarif listrik dan air serta meningkatnya aktivitas yang membutuhkan sumber energi sehingga anggaran tidak tersedia penuh untuk 12 bulan

d. Upaya Pemecahan Masalah:

Berkoordinasi dengan bagian umum untuk membayar listrik 1 bulan dan berkoordinasi dengan PDAM untuk membayar kekurangannya pada tahun anggaran 2019 sebanyak 3 bulan

ii. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi baik yang ada di dalam daerah maupun yang ada di luar daerah

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)			
289.295.000	287.002.000	99,21			
Hasil :					
terpenuhinya rapat - rapat dan konsultasi yang ada di dalam daerah serta rapat - rapat dan konsultasi yang ada di luar daerah, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.					
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya kunjungan lapangan/survey	orang/hari	324	161	49,69%
2	Terlaksananya koordinasi/kunjungan/undangan tingkat regional	orang/hari	41	39	95,12%
3	Terlaksannnya Koordinasi/kunjungan/konsultasi/ undangan Jateng/DIY	orang/hari	175	131	74,86%

4	Terlaksannnya Koordinasi/kunjungan/konsultasi/ undangan Jakarta dan Kabupaten/kota diluar Jateng/DIY	orang/hari	59	126	213,56%
5	Terlaksananya Undangan di luar Jawa	orang/hari	14	20	114,29 %
Rata-rata tingkat capaian total					115,22 %

- c. Permasalahan yang dihadapi : banyaknya undangan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia
- d. Solusi yang ditempuh kedepan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran.

iii. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)
285.227.000	280.021.125	98,17
Hasil :		
Terlaksanya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran tugas sehari-hari selama 12 bulan atas Roda dua roda 4, Komputer pc, laptop, printer, genset, AC, jaringan telpon dan internet, serta Terpeliharanya taman bappeda dan Gedung Kantor (2.090 m2).		

- c. Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang sudah lama masa pakainya dan masih tingginya biaya pemeliharaan hardware dan software komputer karena terbatasnya tenaga teknis informasi (IT)
- d. Solusi yang ditempuh adalah perlu peremajaan kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan penempatan tenaga teknis informasi (IT) yang memadai untuk menekan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana

iv. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)
151.100.000	140.103.000	92,72
Hasil :		
1) Rak Arsip merk VIP 2) Dinamo Stater Perkins 3) Notebook HP 14 - bs 011 Tu Black		

- 4) Printer Epson L310
- 5) Karpet Mushola 1,2 x 12 meter
- 6) AC 1 PK
- 7) Meja Rapat (Interior ruang integrasi)
- 8) Kursi Rapat (Interior ruang integrasi)
- 9) Meja besi / metal (Tempat coffe machine)
- 10) TV Panasonic 49" Resolusi 1080 pixels, LED, bracket, Kabel HDMI
- 11) Coffe Machine Delonghi
- 12) Sound system
- 13) Power Wifi ubility unifi ac-m, Antena 2,4 ghz, 5 ghz, power 8,5W, berat 152gram
- 14) Komputer PC Processor core i3 3,3 ghz, mainboard chipset, intel, DDR 2GB, HDD 500GN, DVDRW, cashing ATX Simbad, Keyboard+mouse optic usb, layar 19", LED
- 15) Notebook HP 14 bs092
- 16) Notebook HP Envy 13
- 17) Printer A3 Epson L1300
- 18) Printer A3 Canon
- 19) UPS Prolink prolink pro7005fc (
- 20) Mesin jilid lem panas, uk folio max ketebalan jilid 50 mm,
- 21) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CB

c. Permasalahan yang dihadapi, tidak ada.

v. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

a. Maksud dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)
20.000.000	19.996.986	99,98

Hasil :

Adapun tema pelatihan perorangan yang dikirim meliputi 3 (tiga) tema yakni

- 1) Pelatihan Struktural Equation Modeling
- 2) Bintek Keuangan Level Eksekutif dengan tema Peningkatan Lokal Tax ratio dan Kinerja Pengelolaan Pemerintah Daerah
- 3) Bintek Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan

c. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sifat dari kegiatan adalah mengirimkan peserta, sehingga taksiran biaya dan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan.

d. Solusi yang ditempuh adalah kedepan dalam menyusun perencanaan mengacu pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan untuk lintas sektoral khususnya dinas tingkat Provinsi diharapkan lebih awal memberitahukan jenis kegiatan seperti seminar, diklat dan sosialisasi serta

kegiatan lain yang akan dilaksanakan dengan perincian waktu, tempat dan biaya / kontribusi yang harus disediakan.

- vi. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
- Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.
 - Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
38.700.000		37.464.128,00		96,81	
Hasil :					
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rencana Kerja Perangkat Daerah	dokumen	1	1	100 persen
2	LKPJ	dokumen	1	1	100 persen
3	LKjIP	dokumen	1	1	100 persen
4	LKD	dokumen	1	1	100 persen
5	Laporan Pengendalian/Evaluasi Renja	dokumen	4	4	100 persen
6	Laporan bulanan realisasi kinerja	dokumen	12	12	100 persen

- Permasalahan yang Dihadapi : penyusunan LKPJ dan LKJ Ip tergantung pada penyelesaian dari seluruh OPD terutama untuk menghitung rata-rata kinerja sehingga penyusunan LKPJ dan LKJ IP sering terlambat,
- Upaya Pemecahan Masalah : koordinasi secara terus menerus dengan seluruh SKPD.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 4 indikator yakni Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan, Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD, Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu, Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur. Rata-rata capaian program tersebut adalah 88,20% persen dari 4 indikator. Secara lengkap capaian indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

No	Indikator Program	Target 2018	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	29 %	23 %	79,31 %
2	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	100 %	98,5	98,5 %
3	Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %
4	Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur	100 %	75 %	75 %
	Total			88,20 %

1) **Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD**

Indikator Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD menggambarkan peran serta masyarakat dalam pemabngunan (pendekatan partisipatif) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan dari empat pendekatan perencanaan yakni pendekatan partisipatif, politik, teknokratik dan bottom up – top down. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang terakomodir semakin menunjukkan perencanaan yang sejalan dengan keinginan masyarakat. Target dari indikator kinerja ini pada akhir RPJMD adalah sebesar 35 persen, sedangkan target pada tahun 2018 adalah sebesar 29 persen dan terrealisasi sebesar 23 persen. Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel dibawah ini.

INDIKATOR KIENRJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD	persen	29	23	79,31

2) **Tingkat keselarasan Sasaran RKPD terhadap Sasaran RPJMD**

Tingkat keselarasan sasaran RKPD terhadap Sasaran RPJMD dihitung dari kesesuaian indikator sasaran dan target RKPD terhadap indikator sasaran dan target RPJMD. Dari 36 sasaran di RKPD terdapat 36 sasaran yang sama di RPJMD. Adapun indikator kinerja di RKPD sebanyak 66 buah, lebih banyak 1 indikator daripada indikator kinerja di RPJMD yang sebanyak 65 buah. Selanjutnya, target indikator kinerja pada RKPD yang dipasang berbeda dengan RPJMD terdapat 16 buah, dengan 6 target kinerja dibawah target RPJMD dan 10 buah terget kinerja di atas RPJMD. Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat keselarasan Sasaran RKPD terhadap Sasaran RPJMD	Persen	100	98,5	98,5

Indikator kinerja sasaran di RKPD lebih banyak dibandingkan dengan di RPJMD karena pada sasaran “Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” pada indikator kinerja “Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Catatan Sipil” di RPJMD dibagi menjadi dua yaitu indikator kinerja “Persentase Kepemilikan KTP” dan “Persentase Kepemilikan Akte” di RKPD. Adapun target indikator kinerja sasaran yang berbeda dengan RPJMD karena di RKPD telah dilaksanakan penyesuaian dengan keadaan dan kondisi mutakhir terutama dengan mempertimbangkan target kinerja yang telah dicapai tahun sebelumnya.

3) **Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu**

Pada program perencanaan pembangunan daerah selain bertujuan menjaga kualitas dokumen perencanaan juga ditujukan dalam rangka menjamin ketepatan waktu dan ketepatan prosedur. Ketepatan waktu menajdi sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja dokumen setelahnya yakni penyusunan renja OPD, penyusunan KUA-PPAS dan Penyusunan APBD. Menurut Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPD paling lambat ditetapkan pada bulan Juni tahun n-1. Untuk memudahkan penghitungan capaian indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu maka pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai kuantitatif dengan asumsi sebagai berikut RKPD ditetapkan tepat bulan juni dinilai 100; RKPD ditetapkan pada bulan Juli dinilai 75; RKPD ditetapkan pada bulan Agustus

dinilai 50; RKPd ditetapkan pada bulan September dinilai 25; RKPd tidak disusun 0). Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel dibawah ini.

INDIKATOR KIENRJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu	tepat waktu	100	100	100

RKPd disusun dan legalitasnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang RKPd Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2018.

4) Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur

Pada program perencanaan pembangunan daerah selain bertujuan menjaga kualitas dokumen perencanaan juga ditujukan dalam rangka menjamin ketepatan waktu dan ketepatan prosedur. Di atas telah dilaporkan capaian kinerja indikator dokumen perencanaan disusun tepat waktu, sedangkan indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur dapat dijelaskan bahwa keberhasilan indikator ketepatan prosedur ini akan menjamin akuntabilitas kinerja perencanaan. Seluruh langkah dan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan dapat diuji dan ditelusuri kembali prosesnya. Prosedur yang menjadi pedoman adalah Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPd minimal melalui 4 (empat) tahap yakni Konsultasi Publik, Musrenbangcam, Forum OPD, Musrenbangkab. Untuk memudahkan penghitungan capaian indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur maka pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai kuantitatif dengan asumsi sebagai berikut RKPd disusun melewati 4 tahapan dinilai 100; RKPd disusun melewati 3 tahapan dinilai 75; RKPd disusun melewati 2 tahapan dinilai 50; RKPd disusun melewati 1 tahapan dinilai 25; RKPd tidak disusun 0). Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel di bawah ini.

INDIKATOR KIENRJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur	tepat prosedur	100	75	75

RKPd telah disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku walaupun tidak melalui tahapan Forum konsultasi public tersendiri. Sesuai Pasal 179 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Forum Konsultasi Publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan. Berdasarkan hal tersebut, dalam proses penyusunan RKPd, Forum Konsultasi Public dilaksanakan sekaligus pada tahapan-tahapan Musrenbang.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 13 kegiatan meliputi:

i. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun Ekonomi

a. Maksud dan Tujuan :

- Memfasilitasi dan pendampingan terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang mencakup 10 urusan, 2 tujuan RPJMD, 10 sasaran RPJMD, 19 indikator sasaran RPJMD, dan 27 program dalam RPJMD;

- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasian akan kemajuan kegiatan pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2018 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (output);
- Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di bidang ekonomi dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut yang meliputi terhadap hasil (outcome) dan sisi manfaat (benefit) dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan;
- Mendapatkan data-data dan fakta sebagai inform decision guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang ekonomi yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir.

b. Hasil kegiatan adalah

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
118.700.000		110.296.846		92,92	
Hasil : Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Ekonomi Tahun 2018 yang berisi gambaran hasil fasilitasi, diskusi dan desk pada saat penyusunan dokumen perencanaan (Renstra hasil cascading dan Renja OPD) pada rumpun bidang ekonomi serta dokumentasi dan masukan hasil dari kunjungan ke lapangan					
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Renja OPD rumpun Ekonomi	dokumen	7	7	100%
2	Kesuaian Lapangan atas Laporan Pengendalian/Evaluasi Renja Rumpun Ekonomi	kali-dokumen	28	28	100%

a. Permasalahan yang dihadapi :

Diantaranya adalah dikarenakan luasnya lingkup kegiatan pembangunan di bidang ekonomi (10 urusan di 7 OPD, 32 Program, 161 kegiatan) yang akan di monev serta keterbatasan waktu dan personel yang ada, sehingga tidak semuanya program dan kegiatan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi

b. Upaya Pemecahan Masalah :

Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas OPD, rapat-rapat teknis serta desk untuk menggali informasi dengan semua personel di OPD dalam rumpun bidang ekonomi serta menyusun schedule yang bisa terintegrasi dengan kegiatan yang ada di OPD rumpun bidang ekonomi agar dapat mengefektifkan kegiatan dan personel serta mengefesienkan dari sisi waktu pelaksanaan

ii. Review RPJMD

a. Maksud dan Tujuan :

- Untuk mengetahui tingkat capaian antara rencana target sasaran dan program prioritas kabupaten/kota dalam RPJMD dengan realisasi sampai dengan tahun 2017.
- Sebagai bahan masukan dalam melakukan perubahan target kinerja tahunan atau bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya

b. Anggaran dan Realisasi adalah

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
129.250.000		90.631.797		92,92	
Output dari kegiatan ini berupa 25 buku yang berisi tentang Dokumen Evaluasi RPJMD dan rekomendasi (25 buku)					
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Evaluasi RPJMD 2016-2021	dokumen	1	1	100 %
2	Rekomendasi Rencana tindak review RPJMD 2016-2021	rekomen dasi	1	1	100 %

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Perubahan RPJMD sesuai hasil konsultasi dan koordinasi provinsi, tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan, sehingga review RPJMD sampai kegiatan evaluasi (termasuk kesimpulan dan rekomendasi).

d. Upaya Pemecahan Masalah

Hasil Evaluasi digunakan untuk pengambilan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya

iii. Kajian Penataan Dampak Pengembangan Bandara JB Soedirman

a. Maksud dan Tujuan :

Target/ sasaran yang ingin dicapai dengan jasa konsultansi adalah agar hasil Kegiatan Kajian Penataan Dampak Pengembangan Bandara JB Soedirman di Purbalingga dapat terwujud sesuai dengan harapan dan dapat menjadi acuan yang baik dalam langkah-langkah antisipasi dampak tersebut guna memperlancar tahapan-tahapan pembangunan Pemda Kabupaten Purbalingga. Adapun wujud dari target/sasaran yang harus dicapai oleh konsultan dalam pekerjaan kajian tersebut adalah :

- 1) Tersedianya Data Umum di lingkungan sekitar daerah kajian Wilayah Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkön
- 2) Hasil analisis dampak yang timbul baik dampak Positif dan Negatif.
- 3) Tersedianya arahan pembangunan kawasan sekitar bandara khususnya bidang infrastruktur sebagai dampak pembangunan bandara Wirasaba Kabupaten Purbalingga sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal (SPM) jasa pelayanan prasarana dan sarana yang berlaku.
- 4) Rekomendasi prioritas penataan dampak baik positif dan negatif dari adanya Pengembangan Bandara JB Soedirman Purbalingga.

b. Anggaran dan Realisasi adalah

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)			
75.000.000	71.459.500	95,28			
<p>Hasil/produk yang akan dihasilkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Kajian Penataan Dampak berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK), yang minimal meliputi :</p> <p>1) Dokumen Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir ; (Hard copy dan Shoft copy) 3 ganda.</p> <p>2) Rekomendasi Hasil Kajian Penataan Dampak Pengembangan Bandara JB Soedirman.</p>					
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah	dokumen	1	1	100 persen

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Tidak ada

d. Upaya Pemecahan Masalah

Tidak ada

iv. FGD Tematik Kebijakan Daerah

a. Maksud dan Tujuan :

Mendapatkan input dan masukan dari stakeholders terkait dalam rangka membuat kebijakan pembangunan daerah.

b. Anggaran dan Realisasi adalah

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)			
397.807.000	165.896.929				
Hasil :					
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekomendasi kebijakan pengembangan potensi/penyelesaian permasalahan	rekomen dasi	8	5	62,5 persen

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Beberapa narasumber tingkat nasional batal atau tidak dapat menghadiri FGD karena kesibukan atau ketidaksesuaian waktu.

d. Upaya Pemecahan Masalah

- Mengoptimalkan narasumber lokal.

- Untuk efisiensi anggaran, pelaksanaan FGD yang semula direncanakan dilaksanakan di luar kota, cukup di dalam kota, sedangkan kegiatan banchmarking (studi banding) dipending.

v. Penyusunan RKPD

a. **Maksud dan Tujuan :**

Maksud Penyusunan RKPD adalah :

- Menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah untuk satu tahun ;
- Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk :

- Memberikan landasan operasional bagi seluruh OPD dalam menyusun Renja OPD;
- Menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

e. Anggaran dan Realisasi adalah

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
273.750.000		271.161.325		99	
HASIL					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Rancangan Awal RKPD	buku	80	80	100 %
2	Rancangan RKPD	buku	350	350	100 %
3	Rancangan Akhir RKPD	buku	25	25	100 %
4	Perbup tentang RKPD	buku	80	80	100 %

f. Permasalahan yang Dihadapi :

Tidak ada permasalahan yang dihadapi.

g. **Upaya Pemecahan Masalah**

-

vi. Penyelenggaraan Musrenbang

a. **Maksud dan Tujuan :**

Maksud penyelenggaraan musrenbang adalah tersusunnya RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif.

Adapun tujuannya adalah

- Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan.
- Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan;
- Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan daerah berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan.

b. Anggaran dan Realisasi adalah

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
209.950.000		183.937.622		88	
HASIL					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAI-AN
1	Rancangan Awal RKPD	buku	80	80	100 %
2	Rancangan RKPD	buku	350	350	100 %
3	Rancangan Akhir RKPD	buku	25	25	100 %
4	Perbup tentang RKPD	buku	80	80	100 %

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Tidak ada permasalahan yang dihadapi.

d. Upaya Pemecahan Masalah

-

vii. Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud mengembangkan sistem perencanaan terintegrasi berbasis elektronik, sedangkan tujuannya untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga.

b. Anggaran dan Realisasi adalah

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
324.000.000		138.531.292		43	
HASIL					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAI-AN
1	Terimputnya data perencanaan :				

	- Usulan Desa	dokumen	239	239	100
	- Usulan Kecamatan	dokumen	18	18	100
	- Usulan Forum OPD	dokumen	45	45	100
	- Usulan Renja	dokumen	45	45	100
	- Usulan RKPD / PPAS	dokumen	2	2	100

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi Tahun Anggaran 2018, Anggaran Perubahan tidak bisa direalisasikan dikarenakan pihak BPPT beralasan bahwa:

- Anggaran di sediakan pada saat perubahan APBD yang tidak mungkin mengejar waktu proses pelaksanaan sebagaimana yang tertera dalam rencana Perjanjian Kontrak Kerjasama karena dalam proses tersebut ada transaksi keuangan antara Pihak Pemerintah dan BPPT dan apabila dipaksakan akan berdampak resiko pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan oleh Instansi Pemerintah (BPKP dan KPK);
- Inputing data RKA telah masuk ke dalam sistem yang lain (dalam hal ini Sistem SIMDA yang dikelola oleh Bakeuda dan bekerja sama dengan pihak BPKP).

d. Upaya Pemecahan Masalah

- BPPT memohon untuk dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019;
- Review / perpanjangan MoU antara BPPT dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga.

viii. Penyusunan KUA PPAS

a. **Maksud dan Tujuan :**

Maksud penyusunan KUA PPAS adalah mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan KUA PPAS antara lain :

- Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD;
- Menjabarkan kebijakan umum anggaran daerah dan menetapkan plafon anggaran sementara dalam penyusunan RAPBD;
- Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan RAPBD.

b. **Anggaran dan Realisasi adalah**

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)
149.000.000	148.412.072	99,60
HASIL		

NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAI-AN
1	Rancangan Awal KUA	buku	25	25	100 %
2	Rancangan Awal PPAS	buku	25	25	100 %
3	Rancangan KUA	buku	80	80	100 %
4	Rancangan PPAS	buku	80	80	100 %
5	Nota Kesepakatan DPRD-Bupati tentang KUA	buku	80	80	100 %
6	Nota Kesepakatan DPRD-Bupati tentang PPAS	buku	80	80	100 %

c. **Permasalahan yang Dihadapi :**

Tidak ada permasalahan yang dihadapi

ix. **Penyusunan KUA PPAS Perubahan**

a. **Maksud dan Tujuan :**

Maksud penyusunan KUA PPAS Perubahan adalah mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan KUA PPAS Perubahan antara lain :

- Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan;
- Menjabarkan kebijakan umum anggaran daerah dan menetapkan plafon anggaran sementara dalam penyusunan RAPBD Perubahan;
- Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan.

b. **Anggaran dan Realisasi adalah**

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
153.070.000		152.266.654		99	
HASIL					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAI-AN
1	Rancangan Awal KUA Perubahan	buku	25	25	100 %
2	Rancangan Awal PPAS Perubahan	buku	25	25	100 %
3	Rancangan KUA Perubahan	buku	80	80	100 %
4	Rancangan PPAS Perubahan	buku	80	80	100 %
5	Nota Kesepakatan DPRD-Bupati tentang KUA Perubahan	buku	80	80	100 %

6	Nota Kesepakatan DPRD-Bupati tentang PPAS Perubahan	buku	80	80	100 %
---	---	------	----	----	-------

c. **Permasalahan yang Dihadapi :**

Tidak ada permasalahan yang dihadapi

x. Penyusunan RKPD Perubahan

a. **Maksud dan Tujuan :**

Maksud penyusunan Perubahan RKPD adalah guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD adalah:

- Menjadi pedoman bagi OPD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD;
- Menjadi pedoman penyusunan KUPA serta PPAS Perubahan;
- Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antarwilayah dan antarurusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

b. **Anggaran dan Realisasi adalah**

3. Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
146.200.000		145.699.611		99,66	
HASIL					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAI-AN
1	Rancangan Perubahan RKPD	buku	80	80	100 %
2	Rancangan Akhir Perubahan RKPD	buku	80	80	100 %
3	Perbup tentang Perubahan RKPD	buku	80	80	100 %

c. **Permasalahan yang Dihadapi :**

Tidak ada permasalahan yang dihadapi.

xi. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. **Maksud dan Tujuan :**

Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya 3 (tiga) kali pelaksanaan diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga

b. **Anggaran dan Realisasi adalah**

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)			
220.005.000	201.312.021	81,5			
HASIL					
Adapun 6 (enam) tema pembinaan perencanaan pembangunan terdiri dari :					
<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kapasitas Internal Penyusunan Dokumen Perencana dan Implementasi SIMR@L 2) Seminar Nasional E-Government untuk Pengelolaan Keuangan yang lebih baik di Surakarta 3) Pelatihan Capacity Building – Peningkatan kapasitas TEAM BUILDING dan Pengalaman Penerapan ISO Kabupaten Kuningan 4) Benchmarking Penerapan Sakip dan SPI Kabupaten Bandung Barat. 5) Study Implementasi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 6) Bintek Internal dengan tema Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kinerja dengan sub tema Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah 					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Pelatihan tematik	tema	3	6	166,67 persen

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Permasalahan yang dihadapi yaitu belum semua PNS dapat hadir pada setiap even karena berbenturan dengan kegiatan lain.

d. Upaya Pemecahan Masalah

Solusi yang ditempuh adalah ke depan dalam menyusun perencanaan waktu secara menyeluruh

xii. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun PK

a. Maksud dan Tujuan :

- Memfasilitasi dan pendampingan terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang mencakup 16 opd dan 67 program dalam RPJMD;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasian akan kemajuan kegiatan pembangunan Rumpun PK Tahun 2018 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (output);
- Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di Rumpun PK dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut yang meliputi terhadap hasil (outcome) dan sisi manfaat (benefit) dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan;

- Mendapatkan data-data dan fakta sebagai inform decision guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang Pemerintahan dan kesra yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir

b. Anggaran dan Realisasi adalah

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)			
151.900.000	148.991.972	98,09			
HASIL					
Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2018 yang berisi gambaran hasil fasilitasi, diskusi dan desk pada saat penyusunan dokumen perencanaan (Renstra hasil cascading dan Renja OPD) pada rumpun bidang Pemkesra serta dokumentasi dan masukan hasil dari kunjungan ke lapangan					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAI-AN
1	Renja OPD rumpun Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial	dokumen	34	34	100 persen
2	Kesuaian Lapangan atas Laporan Pengendalian/Evaluasi Renja Rumpun Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial	kali-dokumen	136	136	100 persen

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Sangat luasnya lingkup kegiatan pembangunan di bidang Pemkesra (18 urusan, 67 Program di 16 OPD, 548 sekolah dan belum termasuk PAUD) yang akan di monev serta keterbatasan waktu dan personel yang ada, sehingga tidak semuanya program dan kegiatan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi

d. Upaya Pemecahan Masalah

Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas OPD, rapat-rapat teknis serta desk untuk menggali informasi dengan semua personel di OPD dalam rumpun bidang pemkesra serta menyusun schedule yang bisa terintegrasi dengan kegiatan yang ada di OPD rumpun bidang pemkesra agar dapat mengefektifkan kegiatan dan personel serta mengefesiensikan dari sisi waktu pelaksanaan

xiii. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun IPW

a. Maksud dan Tujuan :

- Memfasilitasi dan pendampingan terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang mencakup 6 urusan, 1 Layanan kebencanaan;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasian akan kemajuan kegiatan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2018 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat

efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (output);

- Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut yang meliputi terhadap hasil (outcome) dan sisi manfaat (benefit) dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan;
- Mendapatkan data-data dan fakta sebagai inform decision guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir.

b. Anggaran dan Realisasi adalah

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
148.200.000		147.942.793		99,83	
HASIL					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAI-AN
1	Renja OPD rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	dokumen	6	6	100 persen
2	Kesuaian Lapangan atas Laporan Pengendalian/Evaluasi Renja Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	kali-dokumen	24	24	100 persen

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Luasnya lingkup kegiatan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (7 urusan di 6 OPD) yang akan di monev serta keterbatasan waktu dan personel yang ada, sehingga tidak semuanya program dan kegiatan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi

d. Upaya Pemecahan Masalah

Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas OPD, rapat-rapat teknis serta desk untuk menggali informasi dengan semua personel di OPD dalam rumpun bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta menyusun schedule yang bisa terintegrasi dengan kegiatan yang ada di OPD rumpun bidang ekonomi agar dapat mengefektifkan kegiatan dan personel serta mengefesienkan dari sisi waktu pelaksanaan

3. Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 indikator yakni Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD, Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD, Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD. Rata-rata capaian program tersebut adalah

66,67 persen dari 3 indikator. Secara lengkap capaian indikator kinerja program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2018		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD lingkup IPW	persen	100	100	100 %
	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD lingkup Ekonomi	persen	100	100	100 %
	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD lingkup PK	persen	100	100	100 %
	Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD	persen	100	44	44 %

Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 11 kegiatan meliputi:

i. FEDEP (Bangub)

a. Maksud dan Tujuan :

- Terasilitasinya berbagai kegiatan pengembangan perekonomian daerah khususnya potensi ekonomi lokal dalam skala UMKM serta peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di daerah;
- Memfasilitasi pengembangan klaster usaha dan kerjasama antara klaster dengan *Business Development Services* (BDS) di wilayah;
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi antara pelaku ekonomi lokal dengan pemerintah daerah dalam fungsi diseminasi informasi dan teknologi tepat guna, promosi dan pengembangan produk lokal;
- Mendapatkan data-data, masukan dan rekomendasi sebagai inform decision guna menetapkan tindak lanjut atau pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala serta menyusun laporan akhir.

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)
160.000.000	151.989.994	94,99
Hasil :		
Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan FEDEP yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya : 2 Workshop, 2 FGD, Rapat-rapat koordinasi, fasilitasi lomba "keris jateng", fasilitasi temu klaster, fasilitasi pelaku		

UMKM gelar produk, kunjungan ke pelaku klaster dan Dokumen Profil Investasi Kabupaten Purbalingga					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Rekomendasi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal daerah	rekomendasi	4	4	100%

c. Permasalahan yang Dihadapi :

- Anggaran untuk kegiatan FEDEP yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Bangub) baru bisa diketahui pada bulan Maret, sehingga kegiatan FEDEP baru bisa di sahkan pada APBD Perubahan pada bulan September di Tahun berjalan, hal ini tentunya memperpendek jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atau uraian kegiatan dalam kegiatan FEDEP ini;
- Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam kegiatan FEDEP juga diwajibkan untuk menyusun Dokumen Profil Investasi Kabupaten/Kota guna dilombakan dalam program “Keris Jateng”. Hanya saja jadwal pelaksanaan lomba tersebut di awal Tahun yaitu dari bulan Januari-Maret tentunya sangat menyulitkan pelaksanaannya yang belum bisa didukung penuh karena kegiatan FEDEP itu sendiri masuk dalam APBD Perubahan;
- Selain itu permasalahan lainnya diantaranya adalah dikarenakan usaha UMKM bersifat dinamis dan tergantung peluang pasar sehingga pembinaan dan pengembangan produk ekonomi lokal sering berubah dan berganti, sehingga berimbas pada pelaku usaha yang juga mengikuti perubahan pada sektor usahanya

d. Upaya Pemecahan Masalah

- Pembagian jadwal pelaksanaan pekerjaan atau uraian kegiatan FEDEP dalam TOR untuk memisahkan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan sumber dana Bangub pada saat penyusunan Rencana Kegiatan Operasional (RKO);
- Penyusunan dokumen profil investasi dilaksanakan oleh pihak ketiga, sekaligus juga mengoptimalkan peran OPD DPMPSTSP yang mempunyai tupoksi terkait investasi;
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar lintas OPD dengan melibatkan semua pelaku usaha yang dijadikan role model, rapat-rapat teknis serta desk dan mengadakan pelatihan-pelatihan serta memberikan bantuan untuk pengembangan usaha dan pendampingan ke klaster/pelaku usaha UMKM secara berkesinambungan sampai pelaku usaha tersebut dapat mandiri dan bisa di tiru oleh klaster atau pelaku usaha di sektor usaha UMKM lainnya

ii. Sinkronisasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub

a. Maksud dan Tujuan

- Kordinasi kegiatan TP, DAK dan Bangub dengan OPD penerima bantuan untuk lebih mudah dalam pelaksanaan ;

- Sinkronisasi kegiatan yang diusulkan melalui TP, DAK dan Bangub bisa lebih optimal terencana sehingga mengurangi kegagalan dalam usulan dan pelaksanaan ;
- Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada OPD dalam pengimputan usulan dan pelaksanaan
- Bimbingan teknis dan pelayanan pengaduan terhadap aplikasi yang digunakan oleh anggaran tersebut diatas ;
- Memberikan informasi setiap perkembangan kegiatan tersebut diatas ;

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
116.525.000				97,31	
Hasil :					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Usulan TP	dokumen	1	1	1
2	Usulan DAK	dokumen	1	1	1
3	Usulan Bangub	dokumen	1	1	1
4	Laporan Kinerja TP	dokumen	4	4	4
5	Laporan Kinerja DAK	dokumen	4	4	4
6	Laporan Kinerja Bangub	dokumen	4	4	4

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Banyaknya SDM OPD penerima kegiatan tersebut diatas dikarenakan pergantian personil. Masih ada perbedaan informasi tentang DAK di kementerian masing – masing. Belum adanya kesepakatan yang kuat untuk penggunaan krisna keseluruhan. Pelaporan kegiatan tersebut diatas masih lamban dan perlu percepatan dan kerjasama dengan OPD penerima kegiatan.

d. Upaya Pemecahan Masalah

Perlu kordinasi yang intensif dan pelatihan aplikasi sehingga memudahkan dalam pengimputan. Pengawasan yang intens selama pengimputan, pelaksanaan dan pencairan sehingga permasalahan akan mudah di selesaikan dengan cepat dan tepat.

iii. Penyusunan sistem informasi profil daerah / SIPD (Bangub)

a. Maksud dan Tujuan :

Membangun database Pembangunan atau Profil Daerah yang menggambarkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah secara series.

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
100.000.000		76.391.000		76	
Hasil :					
Sasaran dari kegiatan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah SIPD adalah semua SKPD/OPD baik ditingkat kabupaten maupun yang berada di					

kecamatan terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten purbalingga guna :

- Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan dan hasilnya ;
- Tersedianya data dan informasi daerah dengan sebaran 27 OPD ; 18 kecamatan dan UPTD teknis yang berhubungan dengan isian data SIPD dari kemendagri;
- Terbangunnya manajemen pengelolaan database pembangunan atau profil yang baik dan akurat;
- Ter entrinya / terupadatingnya 3 (tiga) kelompok data Kabupaten Purbalingga tahun 2018 melalui jaringan www.sipd.bangda.kemendagri.go.id

NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Buku Profil data semester	dokumen	2	2	100

- c. Permasalahan yang Dihadapi : -
 iv. Analisa Makro Ekonomi Daerah

a. Maksud dan Tujuan :

- Menganalisis pencapaian Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga dari sisi pengeluaran dan sisi sektoral untuk mengetahui capaian perekonomian daerah Kabupaten Purbalingga.
- Menganalisis pencapaian PDRB Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun terakhir untuk mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi daerah pertahun serta pertumbuhan proporsi setiap sektor terhadap total PDRB
- Menganalisis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan untuk mengetahui perkembangan inflasi.

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
96.000.000		51.505.227		53,65	
Hasil :					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAI-AN
1	Laporan Analisa Ekonomi Makro Kabupaten Purbalingga	buku	30	30	100

c. Permasalahan yang Dihadapi :

Masih terbatasnya sumber data dan kemampuan SDM dalam mengelola data.

d. Upaya Pemecahan Masalah

- Melaksanakan kolaborasi/kerjasama dengan BPS selaku narasumber penyediaan data statistik.
- Efisiensi anggaran di honorarium (perubahan indek), perjalanan dinas, ATK, makan minum, dan penggandaan.

v. Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud dilaksanakannya Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga adalah untuk mendapatkan deskripsi kinerja pencapaian penurunan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dan analisis keterkaitannya terhadap hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang menjadi bahan rumusan kebijakan program dan kegiatan berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- Menghasilkan kondisi kinerja pencapaian kemiskinan Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir.
- Menghasilkan kondisi yang menggambarkan implementasi program Penanggulangan Kemiskinan baik bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- Memberikan kesimpulan atas hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan.
- Menghasilkan rekomendasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan;

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
95.000.000		89.704.900		94,43	
Hasil :					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Rekomendasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan	buku	10	10	100 persen

c. Permasalahan yang Dihadapi :

- Adanya keterlambatan pengumpulan data dari OPD terkait program / kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- Belum adanya *single* data untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

d. Upaya Pemecahan Masalah

- Perlunya koordinasi dengan OPD penyedia data program / kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- Perlu ada *single* data penduduk miskin (by name, by address, by case) sebagai dasar penentuan target sasaran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

vi. Evaluasi RKPD

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud pelaksanaan kegiatan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 adalah untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi sebagaimana yang telah dimandatkan pada peremendagri Nomor 86 tahun 2017, sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui Konsistensi antara kebijaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; Konsistensi antara RPJMD dengan RPJMN dan RTRW nasional; Konsistensi antar RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah; Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD ; Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan; untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat tercapai; memberikan gambaran realisasi penyerapan dana kegiatan yang

dilaksanakan OPD yang ditetapkan dalam APBD tahun 2018 samapai dengan triwulan 1 ; guna mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam rangka penyusunan RKPD perubahan tahun 2018.

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
76.050.000		71.961.119		95	
Hasil :					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi Renja/RKPD yang ditindaklanjuti	rekomendasi	47	38	80,85

c. Permasalahan yang Dihadapi : -

vii. Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia

a. Maksud dan Tujuan :

- Tersajinya data dan informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga.
- Data dimaksud diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumberdaya manusia di Kabupaten Purbalingga, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.
- Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Purbalingga.
- Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga.
- Diperolehnya gambaran tentang perkembangan ukuran pembangunan manusia (IPM) dan indikator - indikator sosial lainnya di Kabupaten Purbalingga.
- Terumuskannya strategi untuk menangani berbagai masalah yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia.

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
75.000.000		71.874.751		95,83	
Hasil :					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Rekomendasi Strategi Pembangunan Manusia	buku	20	20	100 persen

c. Permasalahan yang Dihadapi :

- Data komposit IPM yang dievaluasi merupakan tahun n – 1 (tahun 2017) bukan tahun berjalan (2018), karena rilis data IPM selama ini adalah tahun n – 1.

- Tidak tersedianya capaian komposit IPM yang terpilah, sehingga tidak diketahui kesenjangan gender (misal : AHH, RLS, HLS, tidak dipilah).
- d. **Upaya Pemecahan Masalah**
- Perlunya koordinasi dengan penyedia data IPM (BPS), untuk menyediakan data terbaru (data tahun berjalan), bilamana memungkinkan.
 - Perlunya koordinasi lebih intensif dengan penyedia data komposit IPM (BPS), agar capaian angka komposit dapat terpilah laki – laki dan perempuan (data pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita), sehingga memudahkan dalam intervensi kelompok sasaran penerima program / kegiatan.
 - Peningkatan capaian IPM dan kompositnya agar dapat dijadikan gerakan yang diarusutamakan oleh seluruh OPD.

viii. **Analisa Hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah**

a. **Maksud dan Tujuan :**

- Maksud dari kegiatan ini adalah mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga.
- Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi gambaran pencapaian status sosial ekonomi masyarakat melalui berbagai indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi dan perumahan.

b. **Penganggaran dan Realisasi**

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
83.787.000		78.983.374		94,27	
Hasil :					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Posisioning Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2017	buku	30	30	30

c. **Permasalahan yang Dihadapi :**

ix. **NANGKIS (Bangub)**

a. **Maksud dan Tujuan :**

- Memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dan pelaksanaan koordinasi dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga;
- Memberikan gambaran tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- Merumuskan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan efektivitas kinerja TKPK Kabupaten Purbalingga dalam upaya pelaksanaan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan.

b. **Penganggaran dan Realisasi**

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
83.787.000		78.983.374		94,27	
Hasil :					

NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Rekomendasi penanggulangan kemiskinan	rekomendasi	3	3	100 persen

c. Permasalahan yang Dihadapi :

- Kurangnya penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui penguatan TKPK Kabupaten Purbalingga.
- Belum semua OPD menggunakan single data dalam penentuan sasaran/targetting program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

d. Upaya Pemecahan Masalah

- Perlu sinergitas dan harmonisasi berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama yang berkaitan penentuan fokus dan lokus dengan mempertimbangkan dimensi kewilayahan.
- Perlu komitmen dalam penggunaan single data dalam implementasi program dalam rangka akselerasi penurunan angka kemiskinan guna mendukung pencapaian target nasional, provinsi, kabupaten.

a. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target anggaran : Rp. 105.000.000,-
- 2) Realisasi Keuangan : Rp. 84.984.369,- (80,94 %)

x. GAKY (Bangub)

a. Maksud dan Tujuan :

- Dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mengkonsumsi garam yang beriodium yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Bertujuan untuk meningkatkan cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kabupaten Purbalingga, mendorong penguatan kapasitas Tim Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dalam koordinasi untuk penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) melalui penanganan garam beriodium, serta menjamin akses konsumsi garam beriodium untuk semua

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
50.000.000		41.824.250		83,65	
Hasil :					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Rekomendasi strategi penanganan GAKY	rekomendasi	1	1	100 persen

c. Permasalahan yang Dihadapi :

- Masih adanya desa rawan kekurangan asupan garam beriodium. Saat ini cakupan desa dengan konsumsi garam beriodium di Kabupaten Purbalingga masih belum mencapai 100% yaitu sekitar 97,7 %.
- Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Tim Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI).

d. Upaya Pemecahan Masalah

- Meningkatkan cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kabupaten Purbalingga.
- Menjamin akses konsumsi garam beriodium untuk semua

- Penguatan kapasitas Tim Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dalam koordinasi untuk penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) melalui penanganan garam beriodium.

xi. PUS (Bangub)

a. Maksud dan Tujuan :

- Terlaksananya fasilitasi program PUS di Kabupaten Purbalingga.
- Meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang pentingnya pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Purbalingga.
- Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan kinerja Forum Pendidikan untuk Semua (PUS) sebagai wadah koordinasi antar stakeholder.
- Mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian program Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Purbalingga.
- Mengidentifikasi dan dan memetakan permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga.
- Sebagai bentuk fasilitasi dan upaya sistematis, terarah, dan terpadu dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua.
- Diperolehnya sinkronisasi, harmonisasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program PUS sebagai salah satu program penting di bidang pendidikan.

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
75.000.000		65.526.727		87,37	
Hasil :					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Buku Laporan Tahunan Kinerja PUS	Buku	5	5	100

c. Permasalahan yang Dihadapi :

- Kurangnya peran provinsi (Dindikprov./BAPPEDA Prov.) dalam pengawalan pelaksanaan kegiatan PUS yang bersumber Ban – Gub. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya KIE program dan tata cara penyusunan laporan akhir PUS / EDI.
- Belum ada sinkronisasi program, target, maupun rencana aksi PUS pasca 2015 dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
- Tidak semua kegiatan pembangunan pendidikan yang terdapat dalam OPD terpantau dan termonitor ;
- Belum sempurnanya penyediaan data yang valid dan akurat dalam rangka penghitungan capaian target kinerja Pendidikan Untuk Semua baik data dari BPS, Kemenag., Dindikbud., dan Dinaker.

d. Upaya Pemecahan Masalah

- Perlunya koordinasi yang lebih intensif dan upaya lebih optimal guna peningkatan capaian kinerja pembangunan bidang Pendidikan ;
- Perlunya penguatan kelembagaan Pendidikan untuk Semua baik kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua maupun Sekretariat Forum Pendidikan untuk Semua ;

- Peningkatan intensitas koordinasi dengan Dindik Prov dan BAPPEDA Prov terkait pelaksanaan dan pelaporan Program PUS, terutama PUS pasca Tahun 2015 (Pendidikan Sepanjang Hayat).

4. Program Penelitian dan Pengkajian Daerah

Program Penelitian dan Pengkajian Daerah terdiri dari 3 indikator yakni Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah, Jumlah kerjasama kelitbangan. Rata-rata capaian program tersebut adalah 103 persen dari 3 indikator. Secara lengkap capaian indikator kinerja program Penelitian dan Pengkajian Daerah adalah

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	100	100	100,00%
2	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah	persen	100	100	100,00%
3	Jumlah kerjasama kelitbangan	kerjasama	6	7	116,67%

Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 1 (satu) program yakni Program Penelitian dan Pengkajian Daerah dengan 6 (enam) kegiatan meliputi:

- i. Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Maksud kegiatan, yaitu terlaksananya fasilitasi penelitian, desiminasi hasil litbang, keikutsertaan lomba krenova tk Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan lomba Krenova Tk. Kabupaten Purbalingga dan Pameran Krenova Tk. Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)	Realisasi (Rp,)	Capaian (%)			
201.800.000	182.838.834	91			
Hasil :					
terbitnya 500 surat ijin penelitian, 1 pameran krenova, 2 workshop/ desminasi, 6 penghargaan lomba krenova Tk. Kabupaten, 1 Fasilitasi lomba krenova Tk. Provinsi hanya 1 target saja yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 5 intensif peneliti dikarenakan di tingkat kabupaten belum ada peneliti atau pendamping dari perguruan tinggi yang ada dipurbalingga.					
NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Rekomendasi Workshop	rekomendasi	4	2	50 %

2	Rekomendasi Kajian Potensi/Permasalahan Daerah	rekomendasi	2	-	-
---	--	-------------	---	---	---

- c. Permasalahan yang dihadapi : Belum adanya jaringan kelitbangan, Dewan Riset Daerah (DRD) atau pendampingan dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Purbalingga.
- d. Solusi : Diharapkan untuk tahun yang akan datang sudah ada pendampingan dari perguruan tinggi dan Dewan Riset Daerah dan juga diharapkan sudah mempunyai jaringan-jaringan yang terkait dengan Kelitbangan agar dapat mengembangkan pembangunan yang ada di Kab. Purbalingga

ii. Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN)

- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu kegiatan pembinaan ilmiah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah/Instansi/ Lembaga setempat sejak tahun 2001 dan PIRN merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah berupa pemberian materi metodologi penelitian, penelitian dilapangan, dan penulisan serta presentasi karya tulis ilmiah yang dibagi dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Teknik. Sedangkan tujuan PIRN adalah Pengembangan kapasitas remaja lokal sekaligus terbentuknya jaringan pembinaan ilmiah bagi remaja dan guru secara nasional dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan daerah yang mendapatkan subsidi alternatif bagi isu dan permasalahan daerah melalui kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peserta dan sebagai ajang promosi secara nasional tentang potensi dan keunggulan daerah yang akan membuka peluang kerjasama bagi penelitian antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
1.225.700.000		1.138.395.242		93	
Hasil :					
Tingkat kehadiran peserta PIRN Pelajar sebanyak 450 orang dan kehadiran Peserta PIRN Guru sebanyak 150 orang.					
1	Kehadiran Peserta PIRN Pelajar	orang	450	450	100%
2	Kehadiran Peserta PIRN Guru	orang	150	150	100%

- c. Permasalahan yang dihadapi : Belum tersedianya tempat /gedung dan sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan tersebut.
- d. Solusi : kerjasama dengan lembaga sekolah berasrama.

iii. Fasilitas KKN

a. Maksud dan Tujuan :

- Bahwa salah satu upaya guna akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kerjasama ini meliputi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

- Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga
- Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga
- Memberikan fasilitasi bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Purbalingga
- Salah satu faktor fundamental dalam pengentasan kemiskinan adalah mengubah perilaku dari masyarakat utamanya di desa, dimana kegiatan mengubah perilaku ini perlu dibudayakan dan tidak langsung terlihat dalam output atau outcome sebuah kegiatan / program. Penguatan kelembagaan desa, davis, posyandu, posdaya, kader kesehatan desa, relawan sosial desa, PPKBD, sub PPKBD/ PKBRT, berbagai macam pelatihan dan penyuluhan bidang pendidikan, kesehatan, hukum, kependudukan/KB, ekonomi, dan berbagai pelatihan lainnya merupakan contoh program kerja mahasiswa KKN yang meskipun tidak kelihatan, dalam jangka panjang sangat berguna bagi peningkatan kesadaran, perilaku positif dan merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
- Mahasiswa KKN merupakan potensi sumber daya yang sangat strategis. Apabila program dan kegiatan mahasiswa KKN diampu oleh OPD dan dianggarkan melalui APBD, akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemitraan yang baik antara pemda dan unsur perguruan tinggi merupakan hal positif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Mengoptimalkan mahasiswa KKN untuk membantu kebutuhan OPD antara lain :
 - Ikut mendistribusikan dokumen kependudukan dari Dinpendukcapil
 - Mengisi form kuesioner dan *interview guide* bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan tematik lain sesuai kebutuhan.
 - Membantu melakukan monitoring dan dokumentasi pada program / kegiatan pembangunan baik yang bersumber APBN, APBD Provinsi / Ban Gub, maupun APBD Kabupaten yang berlokasi di desa KKN.
 - Mahasiswa juga diberikan tugas tambahan untuk :
 - ✓ Mengisi form untuk mengidentifikasi permasalahan masyarakat / desa yang ditemui selama masa KKN.
- Mengisi form untuk mengidentifikasi permasalahan bidang pendidikan (mendata AUS – TS, ruang kelas rusak berat, pendataan fasilitas sekolah), bidang kesehatan (pendataan PMKS, pasung, jambanisasi, PBI, dll), dan berbagai kebutuhan lain yang diperlukan pemda..

b. Penganggaran dan Realisasi

Anggaran (Rp,)		Realisasi (Rp,)		Capaian (%)	
579.875.000		538.668.486		92,89	
Hasil :					
1	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	perguruan tinggi	47	48	102,13 %
2	Fasilitasi Mahasiswa KKN	mahasiswa	2009	2.420	120,46 %

c. Permasalahan yang Dihadapi :

- Kurang tajamnya hasil pemetaan permasalahan hasil observasi mahasiswa, sehingga inisiasi program kerja mahasiswa KKN tidak benar – benar

menjawab permasalahan yang ada di desa lokasi KKN dan terkesan kurang aplikatif.

- Masih ditemui kurangnya intensitas adaptasi mahasiswa dalam masyarakat, personality mahasiswa yang kurang baik, dan ketidakaktifan mahasiswa juga masih ditemui sehingga berpengaruh pada optimalisasi program kerja.
- Adanya program kerja dalam OPD yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa KKN akan tetapi belum dimanfaatkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi.
- Cukup pendeknya jangka waktu KKN sehingga program kerja yang dilaksanakan kurang optimal.

d. Upaya Pemecahan Masalah

- Membekali mahasiswa dalam penguasaan wilayah dan pembekalan untuk memberikan resep praktis dalam pendekatan sosial sehingga melancarkan pelaksanaan program KKN
- Optimalisasi, intensifikasi dan diversifikasi program kerja mahasiswa KKN disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menjadikan KKN sebagai program penting bagi masyarakat
- Optimalisasi koordinasi dengan OPD terkait guna optimalisasi program kerja KKN di wilayah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan Renja SKPD

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan merupakan implementasi visi Pemerintah Daerah. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah

1. Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan dari CC ke B
2. Mewujudkan Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang berkualitas yang ditandai dengan Inventor purbalingga masuk dalam nominator Krenova tingkat Provinsi.

3.2 Sasaran Renja SKPD

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2018, meliputi :

Sasaran pertama dalam rangka mewujudkan tujuan pertama adalah Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator kinerjanya dalah Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah dan tingkat keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD dengan target sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2017)	Target	
				2019	2020
Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	persen	102,44	98	97,5

	Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD	persen	98,5	100	100
--	---	--------	------	-----	-----

Sasaran kedua dalam rangka mewujudkan tujuan kedua adalah Meningkatnya kualitas kelitbangan, dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, dengan target sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2015)	Target	
				2019	2020
Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	-	55	60

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2019 terlihat pada tabel dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
 TAHUN ANGGARAN : 2020

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Penunjang Urusan Pemerintahan				4.436.179.000				5.822.658.000
0403	Perencanaan				4.037.179.000				5.322.658.000
0403.01	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah				1.132.679.000				2.193.158.000
0403.040301.01.001	Penyediaan Bahan dan Jasa Periklanan	Keluaran : Tersedianya daya listrik	Bappellitbangda Purbalingga	182.4 kwh	454.521.000	APBD Kabupaten/Kota		182.4 kwh	500.000.000
0403.040301.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran : Tersedianya Air PAM Keluaran : Tersedianya jasa telepon Keluaran : Tersedianya bahan kantor	Bappellitbangda Purbalingga	528 m ³ 24 sambungan-bulan 12 bulan				528 m ³ 24 sambungan-bulan 12 bulan	
0403.040301.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran : Terlaksananya kunjungan lapangan/survey Keluaran : Terlaksananya koordinasi/kunjungan/undangan tingkat regional Keluaran : Terlaksananya koordinasi/kunjungan/konsultasi/undangan Jateng/DIY Keluaran : Terlaksananya koordinasi/kunjungan/konsultasi/undangan Jabara dan Kabupaten/Kota diluar Jateng/DIY	Bappellitbangda Purbalingga	161 orang/hari 39 orang/hari 131 orang/hari 126 orang/hari	276.460.000	APBD Kabupaten/Kota		161 orang/hari 39 orang/hari 131 orang/hari 126 orang/hari	275.460.000
0403.040301.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Keluaran : Terlaksananya Urangan di luar Jawa Keluaran : terpeliharanya peralatan kantor (Roda dua roda 4, Komputer pc, laptop, printer, genset, AC, jaringan telepon dan internet)	Bappellitbangda Purbalingga	20 orang/hari 12 bulan	312.696.000	APBD Kabupaten/Kota		20 orang/hari 12 bulan	312.696.000
0403.040301.01.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Keluaran : Terpeliharanya taman bapjeda, tan Gedung Kantor	Bappellitbangda Purbalingga	2090 m ³				2090 m ³	
0403.040301.01.005	Penataan Arsip	Keluaran : Parkir lantai 2 Keluaran : PC Komputer Keluaran : Printer Keluaran : TV proyektor	Bappellitbangda Purbalingga	0 paket 0 unit 0 unit 0 unit	0	APBD Kabupaten/Kota		1 palet 15 unit 5 unit 5 unit	1.000.000.000
0403.040301.01.006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Keluaran : Terlaksananya arsip aktif	Bappellitbangda Purbalingga	20 box	20.000.000	APBD Kabupaten/Kota		20 box	25.000.000
0403.040301.01.007	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Keluaran : Terkinimnya SDM dalam pelatihan teknis Perangkat Daerah Keluaran : LK/PJ Keluaran : LKJP Keluaran : RTP Keluaran : Laporan Evaluasi/Pengendalian Kinerja OPD	Yogyakarta - Semarang - Jakarta Bappellitbangda Purbalingga	20 orang/hari 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen	30.000.000	APBD Kabupaten/Kota		20 orang/hari 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen	40.000.000
0403.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keluaran : Laporan bulanan realisasi kinerja	Bappellitbangda Purbalingga	12 dokumen	40.000.000	APBD Kabupaten/Kota		12 dokumen	40.000.000
0403.040301.02.001	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang	Keluaran : Konsultasi Publik Keluaran : Musrenbang kecamatan Keluaran : Forum OPD Keluaran : Musrenbangkab	Kabupaten Purbalingga	1 kali 4 kali 4 kali 1 kali	1.779.600.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 4 kali 4 kali 1 kali	2.104.500.000
					250.000.000	APBD Kabupaten/Kota			250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	8	9	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
0403.040301.02.011	Penyusunan RPJMD	3 Keuaran: Backgroud study RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2025 Keuaran: Rancangan Telemekris RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2025 Keuaran: Rancangan awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2025 Keuaran: Rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2025 Keuaran: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2025 Keuaran: Perda tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2025 Keuaran: Muarebang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2025	4 Kabupaten Purbalingga	5 buku 0 buku 0 buku 0 buku 0 buku 0 dokumen 0 forum	250.000.000	7 APBD Kabupaten/Kota	8	9 0 buku 80 buku 80 buku 350 buku 80 buku 80 dokumen 1 forum	10 650.000.000	
0403.03	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1.125.000.000				1.025.000.000	
0403.040301.03.001	Sinkronisasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub	Keuaran: Usulan DAK / TP / Bangub Keuaran: Pelaporan DAK / TP / Bangub	Kabupaten Purbalingga	3 dokumen 36 dokumen	100.000.000	APBD Kabupaten/Kota		3 dokumen 36 dokumen	100.000.000	
0403.040301.03.002	Evaluasi RKPD	Keuaran: Laporan Evaluasi / Pengendalian Kinerja RKPD Daerah	Kabupaten Purbalingga	4 dokumen	100.000.000	APBD Kabupaten/Kota		4 dokumen	100.000.000	
0403.040301.03.004	Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Daerah	Keuaran: Analisis Makro Ekonomi Daerah	Kabupaten Purbalingga	10 buku	70.000.000	APBD Kabupaten/Kota		10 buku	70.000.000	
0403.040301.03.008	Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia	Keuaran: Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia	Kabupaten Purbalingga	10 buku	60.000.000	APBD Kabupaten/Kota		10 buku	60.000.000	
0403.040301.03.010	Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kestora	Keuaran: Laporan Evaluasi Ekonomi dan Kestora	Kabupaten Purbalingga	10 buku	75.000.000	APBD Kabupaten/Kota		10 buku	75.000.000	
0403.040301.03.013	FGD tematik Kebijakan daerah	Keuaran: Laporan FGD Tematik	Kabupaten Purbalingga	6 tema	3.10.000.000	APBD Kabupaten/Kota		6 tema	310.000.000	
0403.040301.03.014	Analisis survey Nilai Tukar Pelani (NTP)	Keuaran: Laporan Hasil survey Nilai Tukar Pelani	Kabupaten Purbalingga	12 bulanan	100.000.000	APBD Kabupaten/Kota		12 bulanan	100.000.000	
0403.040301.03.015	Analisis Pemerataan Pembangunan Kabupaten Purbalingga	Keuaran: Laporan Kelmpangan pendapatan antar wilayah kecamatan, antar individu dan antar kelompok penghasilan	Kabupaten Purbalingga	10 buku	150.000.000	APBD Kabupaten/Kota		10 buku	150.000.000	
0403.040301.03.016	Evaluasi Kinerja Infrastruktur Pengembangan Kewilayahan	Keuaran: Profil infrastruktur Pengembangan Wilayah	Kabupaten Purbalingga	10 buku	60.000.000	APBD Kabupaten/Kota		10 buku	60.000.000	
0403.040301.03.017	Analisis Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Purbalingga	Keuaran: Laporan Gap penyediaan infrastruktur masing-masing Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp, PKL, PKLP, PPK dan PPL)	Kabupaten Purbalingga	10 buku	100.000.000	APBD Kabupaten/Kota		10 buku	0	
0406	Penelitian dan Pengembangan				398.000.000				500.000.000	
0406.01	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				388.000.000				500.000.000	
0406.040301.01.001	Fasilitasi KKN	Keuaran: Kerjasama dengan Perguruan Tinggi KKN Keuaran: Fasilitasi Mahasiswa KKN	Kabupaten Purbalingga	4 perguruan tinggi 600 mahasiswa	199.000.000	APBD Kabupaten/Kota		4 perguruan tinggi 600 mahasiswa	250.000.000	
0406.040301.01.002	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Keuaran: Evaluasi Penerimaan SIDA Keuaran: Lomba Krenova Keuaran: Pameran Krenova Keuaran: Deseminas Hasil Keribangan	Kabupaten Purbalingga	1 dokumen 1 even 1 even 1 deseminasi	200.000.000	APBD Kabupaten/Kota		0 dokumen 1 even 1 even 3 deseminasi	250.000.000	

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan suatu bentuk tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi perubahan dimana dalam perencanaan dan penyusunannya memerlukan pengamatan yang tepat dan akurat, serta penilaian dan antisipasi yang efektif. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan bukan hanya diukur dari tingkat pencapaian *output* dibandingkan dengan *input* yang digunakan, tetapi lebih dari itu diukur juga dari sejauh mana pencapaian *outcome* dan *benefit* serta dampak dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sangat ditentukan oleh kapabilitas dan integritas sumber daya manusia yang berinovasi tinggi dalam mewujudkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal. Dalam mencapai kinerja tersebut harus di dukung oleh prasarana dan sarana yang cukup dan sumber daya manusia aparatur yang profesional. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi dan kinerja organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak yang terkait, khususnya segenap pegawai/personil yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, karena Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga akan dapat dicapai dengan baik apabila didukung oleh semangat, dedikasi, integritas dan upaya maksimal dari seluruh personil yang ada.

Selanjutnya dokumen perencanaan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 sebagai tahapan pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam membangun Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu lima tahun kedepan.


Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga
Sekretaris
SISWANTO, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720527 199803 1 005